

**ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nina Andriany Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ninaandriany@dosen.pancabudi.ac.id¹

Abstract

This research aims to prepare a Budget Realization Report (LRA) which includes ratios with criteria. The theory used in this research is government accounting standards and the hypothesis proposed is that income variance is unfavorable, regional independence is very good and the effectiveness of PAD is quite effective. That the analytical tool in this research uses a quantitative descriptive method, namely by studying government accounting standards applied in the field so that there are differences with phenomena and the field in the field of the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). Based on the research results, it can be concluded that regional revenues have not been able to obtain revenues exceeding the budgeted amount and have not been able to increase original regional revenues, including revenues.

Keywords: *Budget Realization Report, Income Analysis and PAD Effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Value for Money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode *value for money*, selain penilaian finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian.

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam: 1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. 2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Evaluasi kinerja keuangan daerah merupakan proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola secara efektif, efisien, dan transparan demi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut hingga akhir kuartal III tahun 2022 masih berjalan normal, kendati dari angka persentase serapan terbilang rendah. Realisasi belanja di APBD Sumut yang baru mencapai 55,82 persen, karena adanya perubahan dalam anggaran (P-APBD) tahun 2023. Anggaran perubahan melonjak, lebih besar dari APBD murninya sehingga persentase untuk serapan belanjanya jadi lebih kecil. Angka realisasi belanja Provinsi Sumut yang terbilang kecil juga karena adanya proyek infrastruktur yang belum masuk periode pembayaran.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.

Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu:

1. Kemampuan Struktural Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi sebagai berikut:

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur sebagai berikut:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2 Value For Money

Menurut Mahmudi (2015), “*Value for Money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi”..

Manfaat *value for money* dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat tiga indikator utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

1. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input *value* yang dinyatakan dalam satuan

moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif.

2. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/ pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Karena di satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan. Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor publik diidentikkan dengan pelayanan publik.

Tingkat input, output dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan dengan metode *value for money*. Tahap pertama suatu organisasi adalah menentukan input, output dan outcome, dari penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Skema proses kerja dan pengukuran *value for money* digambarkan sebagai berikut:

1. Input: merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Contoh input diantaranya seperti dokter di rumah sakit, guru di sekolah, polisi di kapolda, pegawai di suatu instansi, input dapat juga dinyatakan dalam bentuk uang, misalnya untuk biaya dokter, gaji guru, dan harga tanah.
2. Output: merupakan hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan, ukuran output ini menunjukkan hasil implementasi dari program atau aktivitas. Contoh output yang dihasilkan polisi adalah tegaknya hukum dan rasa aman masyarakat ukuran output dapat diperkirakan dengan turunnya angka kriminalitas.
3. Outcome: merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang dikehendaki. Contoh outcome dari dinas kebersihan adalah terciptanya lingkungan kota yang aman bersih dan sehat.

2.3 Pengukuran Ekonomis

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomis merupakan ukuran relatif. Rumus pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Tidak Ekonomis
2	80 - 100	Kurang Ekonomis
3	60 - 80	Cukup Ekonomis
4	40 - 60	Ekonomis
5	< 40	Sangat Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015)

2.4 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang di hasilkan terhadap input yang di gunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Karena jika dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu bagian dari indikator *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
2. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Tidak Efisien
2	90 - 100	Kurang Efisien
3	80 - 90	Cukup Efisien
4	60 - 80	Efisien
5	< 60	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2015)

2.5 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar

biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Tabel 3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

No	Kinerja Keuangan (%)	Kriteria Penilaian
1	> 100	Sangat Efektif
2	80 - 100	Efektif
3	60 - 80	Cukup Efektif
4	40 - 60	Kurang Efektif
5	< 40	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulisan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, Menurut Sugiyono (2015), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”. Menurut Sugiyono (2018), “Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder yaitu data/ dokumen yang diperoleh dalam bentuk laporan keuangan serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu:

- Pengumpulan Data: merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
- Reduksi Data: merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- Penyajian Data: merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Uraian	Reff.	APBD	Realisasi	%
Pendapatan - LRA	4	12.011.625.563.716,00	5.108.231.923.907,84	42,53
Pendapatan Asli Daerah - LRA	4.1	6.819.012.313.316,00	3.006.812.037.506,84	44,09
Pajak Daerah	4.1.1	6.227.774.043.083,00	2.602.443.358.502,00	41,79
Retribusi Daerah	4.1.2	68.415.527.040,00	9.964.218.985,00	14,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	354.759.991.476,00	270.036.920.448,00	76,12
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.4	168.062.751.717,00	124.367.539.571,84	74,00
Pendapatan Transfer	4.2	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.2.1	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93
Dana Perimbangan	4.2.2	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.3	99.268.000.000,00	16.732.137.454,00	16,86
Pendapatan Hibah	4.3.1	74.268.000.000,00	5.092.962.585,00	6,86
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.2	25.000.000.000,00	11.639.174.869,00	46,56
Belanja	5	12.649.625.563.716,00	3.690.836.477.741,21	29,18
Belanja Operasi	5.1	7.649.152.169.985,00	2.416.122.947.637,76	31,59
Belanja Pegawai	5.1.1	3.389.494.648.546,00	1.322.969.532.583,00	39,03
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2	2.528.763.172.846,00	565.067.183.073,76	22,35
Belanja Hibah	5.1.3	1.695.551.376.043,00	527.124.871.861,00	31,09
Belanja Bantuan Sosial	5.1.4	35.342.972.550,00	961.360.120,00	2,72
Belanja Modal	5.2	1.952.878.620.037,00	76.463.214.262,45	3,92
Belanja Modal Tanah	5.2.1	254.994.921.040,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2	310.077.982.759,00	19.970.547.031,00	6,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3	432.992.536.209,00	2.090.803.412,45	0,48
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.4	949.091.014.868,00	53.550.115.515,00	5,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5	5.722.165.161,00	851.748.304,00	14,89
Belanja Tidak Terduga	5.3	45.700.753.548,00	362.680.625,00	0,79
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	45.700.753.548,00	362.680.625,00	0,79
Belanja Transfer	5.4	3.001.894.020.146,00	1.197.887.635.216,00	39,90
Belanja Bagi Hasil	5.4.1	2.588.009.792.626,00	1.197.887.635.216,00	46,29
Belanja Bantuan Keuangan	5.4.2	413.884.227.520,00	0,00	0,00
Surplus/ Defisit		-638.000.000.000,00	1.417.395.446.166,63	-222,16

Sumber: BKAD Prov. Sumut (2022)

4.2 Pembahasan

1. Analisis *Value For Money*

1. Pengukuran Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} = \frac{3.690.836.477.741,21}{12.649.625.563.716,00} = 29,18\%$$

2. Pengukuran Efisiensi =

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} = \frac{3.690.836.477.741,21}{5.108.231.923.907,84} = 72,25\%$$

3. Pengukuran Eektivitas

$$\text{Rasio Eektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} = \frac{5.108.231.923.907,84}{12.011.625.563.716,00} = 42,53\%$$

2. Penilaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil Analisis *Value for Money* pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka disampaikan hasil penilaian kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

a. Pengukuran Ekonomis Dalam Menilai Kinerja Keuangan

Pengukuran ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Kinerja pemerintah akan dikatakan ekonomis, apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen, semakin kecil rasio ekonomis berarti rasio kinerja semakin baik. Berdasarkan hasil analisis *value for money* maka kinerja keuangan tahun 2022 bernilai 29,18% dengan kriteria sangat ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa telah mampu mengelola keuangan secara sangat ekonomis sehingga dapat mengendalikan belanja-belanja yang dikeluarkan dengan meminimalisir anggaran yang digunakan agar lebih hemat dan tepat sasaran.

b. Pengukuran Efisiensi Dalam Menilai Kinerja Keuangan

Pengukuran Efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah akan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen, semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja semakin baik. Berdasarkan hasil analisis *value for money* maka kinerja keuangan tahun 2022 bernilai 72,25% dengan kriteria efisien. Hal ini menunjukkan bahwa telah menggunakan anggaran tersebut dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya dalam merealisasikan program satuan kerja terbaik sehingga dari program tersebut memperoleh pendapatan yang maksimal.

c. Pengukuran Eektivitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan

Pengukuran eektivitas menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah akan dikatakan eektivitas apabila rasio yang dicapai sama dengan atau lebih dari seratus persen, semakin tinggi rasio eektivitas berarti rasio kinerja semakin baik. Berdasarkan hasil analisis *value for money* maka kinerja keuangan tahun 2022 bernilai 42,53% dengan kriteria kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mampu merealisasikan pendapatan lebih besar dibanding anggaran

pendapatan dan tidak berhasil menjalankan program satuan kerja sesuai dengan target yang ditentukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Value For Money* melalui pengukuran ekonomis dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria sangat ekonomis, dikarenakan mampu meminimalisir anggaran yang digunakan agar lebih hemat dan tepat sasaran pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- b. *Value For Money* melalui pengukuran efisiensi dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria efisien, dikarenakan mampu menggunakan anggaran belanja dengan baik dan dalam merealisasikan dapat memperoleh pendapatan yang maksimal pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.
- c. *Value For Money* melalui pengukuran efektivitas dalam menilai kinerja keuangan dengan kriteria kurang efektif, dikarenakan tidak mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target anggaran pendapatan yang ditentukan pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, pada Pendapatan Daerah sebaiknya diupayakan realisasi pendapatan melebihi jumlah Anggaran Pendapatan dan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga sumber dayanya.

- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti Selanjutnya lebih mendalami mengenai kinerja keuangan terkait realisasi pendapatan asli daerah dan menggunakan lebih banyak rasio RAPBD sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat serta diharapkan ruang lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Belanja Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal ISSN (2303-1174) Hlm. 279-282.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. (2014). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014- 2016*. bpkad.pemkomedan.go.id.
- Cahya, Nindy. (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010- 2013)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya
- Espinoza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Gusti Ayu Widiyanti, I., Fitriyah, N., & Bayu S, A. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pendekatan Value For Money Pemerintah Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Mataram*. AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 7(1), 1–13.

- Harmain, H., Naser Daulay, A., Tamara Enre, D., & Medan Sumatra Utara Medan, U. (2020). *Analysis Of Value For Money*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2).
- Handayani, N., & Budiyanto, A. (2021). *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 11 No. 3, 16.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 1.
- Jandi, Ibnu. (2014). *Kajian Atau Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Daerah Pada APBD 2014 Di 34 Provinsi Dalam Wilayah NKRI*. Kompasiana.com.
- Kariyoto, K. (2018). *Implementasi Value For Money, Input Output Outcome Dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 11(1), 72–82.
- Larasati, R. S. S., & Nurhayati. (2022). *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money*. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1).
- Mentari Kurnia dan Ririn Irma. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ISSN.
- Mulyaningtyas. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto Dengan Pendekatan Value For Money*. Prive Volume 1 Nomor 2.
- Nabila Astriana, Muhibtari. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J. (2020). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(4), 781–788.
- Risky, Puput. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sari, Ratna. (2017). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.